



STRATEGI PENCEGAHAN STUNTING BERBASIS TATA KELOLA DANA DESA

Bekti Handayani¹, Bambang Arianto^{2*}

¹Universitas Bhakti Kencana Serang, Banten, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya, Banten, Indonesia

*Email penulis korespondensi: ariantobambang2020@gmail.com

Riwayat artikel: diterima 21 Juni 2022 , diterima 27 Juni 2022 , diterbitkan 30 Juni 2022

<i>Penulis koresponden</i>	<i>Abstract</i>
Bambang Arianto	This research aims to elaborate a stunting prevention strategy based on village fund management. Utilization of village funds can be used to succeed in various stunting prevention programs at the rural level such as specific nutrition intervention, sensitive nutrition intervention, strengthening awareness and knowledge of village citizenship. However, not all village governments have prioritized the use of village funds for stunting prevention. Factors of knowledge and insight into the dangers of stunting are still not evenly distributed in the reasoning of village government officials. This research uses an explanatory qualitative approach with an in-depth interview technique and observation to mothers under five and the village government in Serang Banten Regency. Thus, this research found that the utilization of village funds can contribute to efforts to strengthen the main indicators of stunting prevention such as health service infrastructure, nutrition intervention, awareness and knowledge of village citizenship. This research also found that good village fund management can contribute to the strengthening of the active participation of the villagers in the stunting prevention program. Keywords: <i>Stunting; Governance; Village Fund; prevention.</i>
<i>Jurnal Dialogika</i> diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Pascasarjana Universitas Majalengka	Abstrak Penelitian ini bertujuan mengelaborasi strategi pencegahan stunting berbasis tata kelola dana desa. Pemanfaatan dana desa dapat digunakan untuk mensukseskan berbagai program pencegahan stunting di tingkat perdesaan seperti intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, penguatan kesadaran dan pengetahuan kewargaan desa. Kendati demikian tidak semua pemerintah desa telah memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pencegahan stunting. Faktor pengetahuan dan wawasan terhadap bahaya stunting masih belum merata dalam nalar para aparatus pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatoris dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi kepada para ibu balita serta pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Serang Banten. Dengan demikian penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan dana desa dapat berkontribusi bagi upaya memperkuat indikator utama pencegahan stunting seperti infrastruktur layanan kesehatan, intervensi gizi, kesadaran dan pengetahuan kewargaan desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa tata kelola dana desa yang baik dapat berkontribusi bagi penguatan partisipasi aktif dari kewargaan desa dalam program pencegahan stunting. Kata kunci: <i>Stunting; Tata Kelola; Dana Desa; Pencegahan.</i>

PENDAHULUAN

Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting anak di bawah usia lima tahun (balita) Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Hal itu membuat pemerintah Indonesia menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2024 turun menjadi 14 persen yang artinya setiap tahun mesti ada penurunan 3,8 persen. Sementara data lain menjelaskan bahwa data prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 adalah 24,4 persen, masih di atas angka acuan organisasi kesehatan dunia (WHO) yaitu 20 persen (Nugraheni, 2022). Data tersebut semakin menegaskan bahwa pencegahan stunting di Indonesia masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang signifikan terutama di wilayah perdesaan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada kemiskinan di wilayah perkotaan. Tahun 2021 sebanyak 7,6 persen penduduk perkotaan jauh dalam kategori miskin, sementara di perdesaan angkanya mencapai 12,15 persen (Bps.go.id, 2022). Identifikasi tersebut turut menyebabkan tingginya angka stunting di wilayah perdesaan. Perlu diketahui bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi, infeksi berulang dan tidak mendapat cukup stimulasi psikososial sejak balita berada dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupan (Handayani, 2021). Stunting tidak hanya berakibat pada rendahnya kualitas kesehatan fisik, tetapi juga terganggunya perkembangan intelektual ketika anak-anak tersebut menjadi dewasa. Dengan kata lain stunting berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian salah satu tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia hingga saat ini adalah mengatasi stunting di wilayah perdesaan.

Oleh karena itu muncul usulan agar minimal 10 persen dari dana desa yang diterima dapat dialokasikan untuk

menangani stunting (Kemenkeu.go.id, 2022). Terlebih penanggulangan stunting merupakan salah satu prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang tercermin dalam penggunaan dana desa untuk mengatasi stunting sejak 2018. Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Kemendesa PDTT telah menertbitkan beberapa buku saku pedoman mengatasi stunting yang berisi daftar kegiatan dan indikator keberhasilan program (Kemkes.go.id, 2017). Perlu diketahui bahwa dana desa merupakan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat untuk pengembangan desa, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan mencegah stunting. Dana desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan (Arifin et al., 2020).

Dengan demikian berbagai program pencegahan stunting dapat memanfaatkan dana desa untuk melakukan kampanye dan tindakan intervensi gizi dalam bentuk penyediaan makanan bergizi dan vitamin. Hal itu seperti yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dengan mengeluarkan aturan penggunaan dana desa untuk pengetasan kemiskinan yang kemudian diakomodir dalam APBDesa (Fariz et al., 2020). Dengan kebijakan tersebut pemerintahan desa dapat memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang gizi seimbang lewat pelatihan bagi ibu hamil dan orangtua yang memiliki anak balita. Melalui dana desa pemerintah desa dapat lebih banyak menggelar berbagai kegiatan keberlanjutan yang dapat membangun kesadaran akan upaya mencegah stunting secara mandiri dan sukarela. Melalui upaya membangun kesadaran bisa menciptakan pola asuh yang baik dari para ibu balita terhadap pemberian makanan bergizi (Permatasari, 2020).

Lebih lanjut, dana desa juga dapat digunakan sebagai kegiatan kampanye seperti pentingnya makanan bergizi dengan gizi seimbang, tidak hanya karbohidrat tetapi juga protein, vitamin dan mineral. Hal itu disebabkan tingkat konsumsi sebesar 22 gram per hari hanya ideal untuk memenuhi kebutuhan protein kelompok anak usia 4-6 tahun. Padahal kebutuhan akan protein meningkat seiring meningkatnya usia. Bagi usia produktif (19-65 tahun) sangat memerlukan protein sebesar 60 gram sampai 65 gram per hari. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan protein untuk anak-anak balita di perdesaan cukup besar dan hal itu harus segera diantisipasi. Bila kemudian pola hidup sehat dan pengetahuan juga memadai, maka keberlanjutan upaya-upaya mencegah stunting dapat berjalan simultan. Melalui bantuan dan arahan pemerintahan desa bisa dipastikan masyarakat desa bisa mencukupi gizi seimbang dengan memanfaatkan sumber pangan lokal. Keterlibatan pemerintahan desa dalam menyusun rencana penggunaan dana desa dapat berkontribusi bagi kesuksesan program pencegahan stunting, terutama meningkatkan status gizi anak dan meningkatkan kualitas hidup kewargaan desa. Dengan demikian dana desa memiliki potensi untuk menjadi instrumen terpenting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak-anak di wilayah perdesaan.

Beberapa penelitian terdahulu diketahui telah mengelaborasi pemanfaatan dana desa untuk pencegahan stunting (Lestari et al., 2022). Diketahui penelitian tentang pemanfaatan dana desa untuk pencegahan stunting dan pembentukan desa bebas dari COVID-19 (Pua et al., 2021). Dengan kata lain kegiatan kesehatan sejatinya menjadi prioritas dalam konteks pemerintahan desa. Dampaknya kebijakan dana desa dapat mendukung intervensi penurunan stunting secara terintegrasi dengan baik sesuai indikator capaian intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi

sensitif (Asih et al., 2022). Selanjutnya ada pula program pemanfaatan dana desa untuk memperkuat intervensi gizi spesifik dengan cara merevitalisasi Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk bayi, balita, ibu hamil, hingga community feeding center (CFC) sebagai tempat rujukan pertama kasus gizi di desa. Sementara intervensi gizi sensitif dengan kegiatan atau program pembangunan dan perbaikan sanitasi air bersih dan jambanisasi untuk masyarakat, peningkatan keterampilan, pemberdayaan perempuan dan peningkatan ekonomi kewargaan (Anggreani et al., 2021).

Penelitian lain juga menganalisis pengaruh dan dampak dari penggunaan dana desa dengan penurunan kasus stunting (Lela et al., 2023). Dalam konteks ini tentu pemerintahan desa tidak hanya bekerja sendirian, tetapi diperlukan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dalam percepatan penurunan stunting (Widyowati & Utomo, 2023). Kendati demikian kolaborasi ini tidak hanya antar pemerintahan desa, tetapi juga melibatkan para pemangku kepentingan lainnya seperti organisasi masyarakat (Handayani, 2021). Dengan demikian, beberapa penelitian terdahulu telah mengelaborasi keterlibatan pemerintahan desa dan pemanfaatan dana desa untuk pencegahan stunting. Akan tetapi masih minim penelitian yang mengelaborasi strategi pencegahan stunting dengan pemanfaatan dana desa. Hal ini yang kemudian membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi pencegahan stunting berbasis tata kelola dana desa? Batasan dalam penelitian ini hanya pada strategi pencegahan stunting melalui tata kelola dana desa. Dengan demikian penelitian ini berkontribusi bagi penguatan partisipasi kewargaan desa, sehingga dana desa dapat tepat sasaran dalam program pencegahan stunting..

METODE PENELITIAN

Dalam mengelaborasi pencegahan stunting berbasis dana pemanfaatan dana desa digunakan pendekatan metode kualitatif eksplanatoris. Pendekatan kualitatif eksplanatoris digunakan agar bisa mengelaborasi secara komprehensif pemanfaatan dana desa dalam mempercepat program pencegahan stunting di perdesaan. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada tiga (3) Sekretaris Pemerintahan Desa di Kabupaten Serang yang terdiri dari Pemerintahan Desa Sukaratu, Pemerintahan Desa Tanjungsari, dan Pemerintahan Desa Tanara. Para informan ini dipilih berdasarkan jabatan di Pemerintahan Desa yang menjabat sebagai Sekretaris Desa. Sementara dua (2) ibu balita berasal dari Desa Mongpok dan Desa Bakung Kabupaten Serang. Dalam memperkuat temuan penelitian, juga dilakukan observasi langsung kepada dua (2) informan kunci dengan melibatkan dalam pengabdian masyarakat bertajuk pencegahan stunting.

No	Informan	Kode
1	Pemerintah Desa Tanara	Informan A
2	Pemerintah Desa Sukaratu	Informan B
3	Pemerintah Desa Tanjungsari	Informan C
4	Ibu Balita Desa Mongpok	Informan D
5	Ibu Balita Desa Bakung	Informan E

Tabel 1. Daftar Para Informan Penelitian

Proses pengambilan data dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan teknik *semi structured interview* sesuai cakupan metodologi penelitian (Creswell & Creswell, 2003). Dalam proses wawancara mendalam juga dibantu observasi bertujuan agar data yang diperoleh merupakan data primer dan bisa menjawab pertanyaan penelitian. Waktu pengumpulan data selama dua bulan dari bulan Februari 2022 yang berlokasi di Desa Mongpok, Cikeusal dan Desa Bakung Cikande Kabupaten Serang, Banten. Dalam mengolah data penelitian digunakan teknik analisis berbasis aplikasi NVivo 12 Plus, sehingga

dapat melakukan koding berbasis kategori dan subkategori secara deduktif dan induktif. Strategi bauran deduktif dan induktif agar teori yang digunakan dapat dikonfirmasi dengan temuan penelitian sehingga dapat menciptakan kebaruan (*research gap*). Dengan demikian tahapan penelitian ini meliputi: (1) pemetaan berbagai literatur ilmiah dan data pendukung sesuai topik penelitian. (2) pengelompokan (*coding*) berdasarkan kategori dan sub kategori permasalahan dan pola jawaban dari para informan kunci. 3) pembuatan peta kategori permasalahan dan pola jawaban informan untuk melihat visualisasi kategori permasalahan dan pola jawaban dari para informan. (4) penarikan akhir kesimpulan dengan merangkum temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta berbagai literatur ilmiah sesuai topik penelitian. Berikut ini dijelaskan visualisasi tahapan dan



Gambar 1. Desain Penelitian 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Dana Desa bagi Pencegahan Stunting

Program dana desa bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat basis daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pembangunan desa dapat diperkuat melalui program pemberdayaan ekonomi perdesaan, penciptaan akses transparansi perdesaan dan pemenuhan infrastruktur dasar dengan tujuan kemandirian desa secara berkelanjutan (Hulu *et al.*, 2018). Strategi tersebut dapat memperkuat status desa menjadi desa mandiri yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kendati demikian selama ini pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sangat dominan bila dibandingkan bidang lainnya. Mayoritas kegiatan pemerintahan desa hanya fokus pada bidang pelaksanaan pembangunan desa berupa pekerjaan fisik atau infrastruktur. Meskipun pada masa pandemi COVID-19 diketahui banyak kegiatan pemerintahan desa yang juga fokus pada penanggulangan bencana kesehatan. Sementara bidang pemberdayaan masyarakat desa yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat justru sangat kecil bila dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur desa.

Sejatinya pemanfaatan dana desa yang tepat melalui perencanaan yang baik dan partisipatif dapat mengurangi angka kemiskinan serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain pembangunan infrastruktur itu penting, akan tetapi alokasi dana desa tidak serta merta untuk pembangunan infrastruktur, sebab program pemberdayaan masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintahan desa. Salah satu program pemberdayaan masyarakat tersebut adalah program pencegahan stunting di wilayah perdesaan. Bila tata kelola dana desa dapat dikelola dengan baik sesuai amanat Undang-Undang Desa dan amanat rakyat, maka dapat dikatakan terciptanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yakni biasanya diwakili oleh rakyat dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) seperti pemerintahan desa sebagai pengelola dana desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang baik telah berkontribusi bagi menjaga relasi yang baik antara agen dalam hal ini pemerintahan desa dan *principal* yakni pemilik dana desa yaitu warga masyarakat. Perlu diketahui bahwa teori agensi selalu mengelaborasi relasi kontraktual antara agensi dan prinsipal (Jensen & Smith, 2000). Dalam konteks ini prinsipal adalah pihak yang telah memberikan mandat kepada pemerintah desa sebagai agensi guna melakukan segala bentuk kegiatan sesuai amanat rakyat. Akan tetapi dalam konteks relasi yang dibangun antara agensi dan *principal* tidak serta merta tercipta informasi dan kebijakan dapat searah (Jensen & Meckling, 1976)

Diperlukan berbagai aspek penguatan partisipasi dalam mewujudkan keselarasan relasi antara agensi dan *principal*. Kendati demikian pemerintahan desa seringkali menghadapi kendala utama seperti minimnya kompetensi sumber daya manusia pada pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. Langkah taktisnya adalah pemerintahan desa harus bisa membangun kolaborasi dengan tenaga pendamping desa untuk memperkuat kompetensi para staf desa. Selain itu peran pemerintah daerah juga sangat menentukan keberhasilan tata kelola dana desa untuk pencegahan stunting. Perlu diketahui bahwa dana desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dana desa dapat dikatakan sebagai sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat untuk pengembangan desa. Dana desa tentu memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan warga dan mencegah stunting di perdesaan (Hendrawati & Pramudianti, 2020). Beberapa kendala dan tantangan masih ditemui dalam konteks pencegahan stunting berbasis pemanfaatan dana desa. Beberapa kendala tersebut di antaranya: *Pertama*, Tata kelola dana desa yang tidak tepat sasaran. Mayoritas tata kelola dana desa di wilayah Kabupaten Serang masih sangat buuk, sehingga berakibat pada penciptaan program pemberdayaan masyarakat desa yang tidak tepat sasaran. Hal itu disebabkan tidak semua desa mampu membangun tata kelola dana desa yang baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan implementasi dana desa. Dampaknya penggunaan dana desa untuk program pencegahan stunting menjadi kurang optimal.

Dengan kata lain besaran dana desa yang sejatinya diperuntukan untuk program pencegahan stunting semakin tidak jelas. Hal itu diketahui dari beberapa desa yang menyatakan bahwa besaran dana sangat tergantung terhadap permasalahan yang timbul. Artinya bila kemudian ditemui kejadian stunting maka dana desa baru digulirkan untuk program pemberdayaan stunting. Padahal pencegahan stunting tidak mutlak harus ditemui kejadian stunting,

tetapi bisa dimulai dengan membangun kesadaran dan pengetahuan kewargaan tentang bahaya stunting. Hal itu seperti disampaikan oleh salah satu kepala desa berikut ini:

“Di desa kami memang tidak dijelaskan berapa besaran dana desa yang digulirkan untuk pencegahan stunting. Kepala desa hanya menyatakan bahwa besaran dana sangat tergantung terhadap permasalahan yang timbul. Bila tidak ditemukan kejadian stunting, maka program pemberdayaan desa beralih pada kegiatan lainnya” (Informan A).

Kedua, Lemahnya kesadaran dan partisipasi kewargaan desa. Minimnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran kewargaan desa dalam pencegahan stunting menjadi kendala utama di perdesaan. Dalam beberapa kasus, masyarakat desa mungkin tidak memahami sepenuhnya urgensi tentang pencegahan stunting bagi masa depan balita. Lemahnya kesadaran ini juga dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tentang bahaya dan strategi pencegahan stunting berbasis keluarga. Masyarakat desa juga masih minim mengetahui bila dana desa itu bisa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat termasuk untuk program pencegahan stunting (Asih *et al.*, 2022). Timbulnya gejala ini lebih disebabkan oleh keterbatasan tenaga kesehatan yang memang bertugas memberikan kesadaran kepada warga desa akan bahaya stunting dan langkah pencegahannya. Keterbatasan tenaga kesehatan dan kader kesehatan yang aktif memberikan kampanye dapat menghambat implementasi program pencegahan stunting. Selain itu kurangnya tenaga kesehatan dapat mempengaruhi layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil dan anak-anak. Dengan demikian faktor tenaga kesehatan yang terbatas juga dapat mempengaruhi kemampuan dalam melakukan edukasi dan pelatihan gizi di tingkat lokal (Widaryanti, 2022). Hal ini kemudian yang berdampak pada pengetahuan dan kesadaran para ibu balita

sangat minim. Pada akhirnya para ibu balita berupaya memenuhi gizi balitanya dengan pengetahuan yang hanya didapatkan secara turun temurun seperti dari orang tua. Hal ini tentu berdampak pada penurunan gizi balita, karena para ibu banyak memberikan nutrisi yang tidak mendukung gizi balita. Bahkan para ibu balita masih banyak dipengaruhi oleh iklan dari produk yang jauh dari peningkatan gizi balita. Hal itu seperti diutarakan oleh beberapa informan berikut ini:

“Kami sering diundang untuk mengikuti pelatihan dan penyuluhan tentang pencegahan stunting di kantor desa, tetapi memang kegiatannya tidak terus menerus. Akibatnya pengetahuan yang kami dapatkan tidak menyeluruh. Selain itu karena pendidikan kami yang minim sehingga kami tidak begitu paham tentang materi yang disampaikan dalam penyuluhan. Sebaiknya diperlukan banyak pelatihan yang bisa menambah pengetahuan kami tentang bahaya stunting” (Informan E).

“Selama ini pengetahuan untuk makanan bergizi itu hanya kami didapatkan secara turun temurun dari orang tua. Memang pernah ada pelatihan dari kampus tetapi kalau saat sibuk kami tidak bisa mengikuti. Memang faktor kesadaran dan pengetahuan menyebabkan kami tidak bisa memenuhi gizi anak dengan baik. Malah kadang kami memberikan makanan balita itu biasanya melihat dari iklan media sosial atau televisi” (Informan D).

Ketiga, Minimnya infrastruktur penunjang layanan kesehatan. Infrastruktur layanan kesehatan yang belum memadai juga menjadi kendala dalam program pencegahan stunting di perdesaan. Diketahui masih banyak Puskesmas yang berjarak sangat jauh antara satu desa dengan desa lainnya.

Terlebih karena letak geografis membuat akses menuju Puskesmas masih sulit dijangkau oleh warga desa, sehingga kurang mendorong para ibu balita untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan secara rutin. Selain itu program Posyandu juga masih terkesan sebagai program rutinitas tanpa ada langkah konkret dari perbaikan gizi balita. Setiap kegiatan Posyandu tidak semua desa yang bisa mengulirkan dana desa untuk memberikan tambahan nutrisi bagi warga desa. Faktor pendanaan menjadi kendala utama dalam upaya memenuhi gizi balita pada saat kegiatan posyandu. *Keempat*, masih kuatnya mitos kewargaan desa. Dibeberapa wilayah perdesaan mayoritas para ibu balita masih mempercayai mitos kewargaan yang tercipta dari tradisi turun temurun. Salah satu mitos tersebut yaitu masyarakat desa masih mempercayai penanganan persalinan melalui dukun bayi atau "paraji" (Perbawasari *et al.*, 2022). Para ibu balita masih memegang mitos kewargaan bahwa untuk persalinan cukup hanya melalui dukun bayi, bukan dengan bidan desa. Masyarakat desa masih mempercayai mitos bahwa persalinan melalui dukun bayi akan lebih berkah daripada bidan desa. Padahal masyarakat desa belum memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari persalinan melalui dukun bayi.

Pada akhirnya dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, pemerintahan desa harus bisa melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh agama, komunitas, generasi muda desa, hingga tokoh adat. Dengan kolaborasi pemerintahan desa dapat terbantu untuk bisa mewujudkan program pencegahan stunting berbasis dana desa. Hal itu seperti diutarakan oleh salah satu informan berikut ini:

"Untuk program pencegahan stunting, desa kami berupaya untuk melakukan kolaborasi dengan pihak perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Berbagai program pengabdian masyarakat kita upayakan menjadi program bersama, kita fasilitasi melalui dana desa agar

program dari kampus bisa memberikan pengetahuan baru bagi warga dan pemerintahan desa" (Informan C).

Pencegahan Stunting berbasis Dana Desa

Dana desa memiliki peran strategis dalam berbagai sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Diketahui dana desa telah berkontribusi pada peningkatan sektor infrastruktur desa melalui pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi dan fasilitas umum lainnya. Peningkatan infrastruktur desa berbasis dana desa telah berdampak pada konektivitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan dasar terutama untuk pengembangan ekonomi desa. Hal itu membuat angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah perdesaan semakin menurun. Sementara untuk pengembangan ekonomi perdesaan juga semakin bertumbuh terlebih dengan bekerjanya BUMDesa sebagai aspek terpenting dalam pengembangan ekonomi local (Gayo *et al.*, 2020). Dengan pemanfaatan dana desa dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa untuk semakin mengembangkan potensi lokal, peningkatan produksi dan diversifikasi ekonomi desa (Imawan & Mas'adah, 2021). Dalam sektor pertanian, dana desa telah berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung diversifikasi produk pertanian hingga memberikan berbagai pengetahuan baru kepada petani desa. Beberapa desa bahkan telah memanfaatkan dana desa untuk penguatan program pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti konservasi air, penanaman pohon dan pelestarian lingkungan. Sementara dalam sektor pelayanan publik, dana desa telah banyak digunakan untuk memperkuat aspek pelayanan publik. Dana desa telah mendukung program digitalisasi desa sehingga model pelayanan publik di desa perlahan telah bertransformasi secara digital. Melalui pelayanan publik berbasis digital tentu berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efektif dan efisien (Arianto, 2022).

Dengan demikian kebermanfaatan dana desa telah banyak berkontribusi untuk mengubah status desa dari tertinggal

menjadi berkembang hingga mandiri. Kendati demikian penggunaan dana desa tidak hanya diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan menjadi fokus utama dari dana desa. Dengan kata lain program pemberdayaan masyarakat berbasis dana desa bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan wawasan kewargaan desa seperti untuk pelatihan keterampilan, pendidikan dan pengembangan potensi lokal (Jatmiko, 2020). Melalui program pemberdayaan masyarakat, desa akan semakin berkembang dan bertumbuh menjadi desa yang bisa mensejahterakan warganya. Dengan demikian berbagai program pemberdayaan masyarakat perlahan telah mengubah pemahaman warga desa untuk dapat terlibat aktif dalam setiap pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa dan proses pembangunan desa. Salah satu program pemberdayaan masyarakat desa adalah membangun pengetahuan pemahaman tentang pencegahan stunting dalam konteks perdesaan. Stunting dalam konteks perdesaan memiliki permasalahan yang komplek. Hal itu disebabkan wilayah desa mayoritas penduduknya masih dibawah garis kemiskinan, ditambah lagi dengan minimnya fasilitas layanan kesehatan. Faktor lain seperti pengetahuan dan kesadaran kewargaan akan pencegahan stunting juga masih sangat minim. Oleh sebab itu pemanfaatan dana desa untuk memperkuat program pencegahan stunting menjadi langkah taktis terbaik di wilayah perdesaan.

Oleh sebab itu pemerintahan desa harus dapat menyusun strategi pencegahan stunting dengan pemanfaatan dana desa melalui skema kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas program pencegahan stunting (Bismo & Sahputra, 2021). Diketahui beberapa kebermanfaatan dana desa dalam program pencegahan stunting yaitu dapat digunakan untuk peningkatan gizi balita. Salah satu manfaat utama dana desa dalam pencegahan stunting adalah kemampuannya untuk dialokasikan secara spesifik untuk peningkatan gizi balita. Dana desa dapat digunakan untuk menyediakan makanan

bergizi, memberikan suplemen gizi hingga bisa memberikan saran nutrisi yang diperlukan bagi para balita (Aferiaman & Noferius, 2022). Selanjutnya dana desa dapat memperbaiki infrastruktur layanan kesehatan di perdesaan (Mujiwardhani *et al.*, 2019). Dana desa dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur kesehatan dasar, seperti penguatan fasilitas di Posyandu. Dengan adanya fasilitas layanan kesehatan yang memadai di Posyandu, maka para ibu balita bisa mendapatkan layanan kesehatan secara teratur termasuk pemantauan pertumbuhan anak, imunisasi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Hal itu seperti diutarakan oleh beberapa informan berikut ini:

“Kami selalu menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak perlu khawatir ketika datang ke Posyandu. Kami akan selalu memberikan makanan tambahan nutrisi bagi balita. Selain itu juga kami berikan pengetahuan tentang pangan lokal untuk pencegahan stunting yang sumber pendanaanya berasal dari dana desa” (Informan A).

“Dana desa sangat membantu dalam program pencegahan stunting, melalui dana desa kami bisa menyediakan kebutuhan untuk menunjang fasilitas kesehatan bagi ibu balita seperti posyandu. Dana desa juga bisa digunakan untuk bisa memberikan makanan bergizi dalam setiap kegiatan posyandu” (Informan B).

“Dana desa sangat membantu desa kami untuk mencegah tingginya angka stunting. Biasanya dana desa digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan bagi para ibu kader tentang akses air bersih dan sanitasi untuk pencegahan bahaya stunting. Selain itu dana desa juga digunakan untuk memberikan tambahan makanan pendukung ASI kepada balita

pada saat kegiatan posyandu. Dana desa juga digunakan untuk perbaikan fasilitas layanan kesehatan di Posyandu” (Informan C).

Lebih lanjut, pemanfaatan dana desa dapat digunakan untuk memperkuat kompetensi bagi para ibu kader. Dana desa bisa digunakan untuk melakukan berbagai pelatihan dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik (Widayati & Aco, 2020). Para kader kesehatan yang telah mendapatkan pengetahuan cukup kemudian bisa memberikan informasi kepada ibu hamil dan masyarakat sekitar mengenai praktik gizi yang sehat, pencegahan penyakit dan pola makan yang baik untuk pertumbuhan anak. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kompetensi, pengetahuan dan wawasan tentang kesehatan ibu dan anak bagi para ibu kader. Dengan kata lain dana desa dapat digunakan untuk berbagai kampanye penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan stunting (Mustafa & Kusyati, 2021). Kegiatan tersebut dapat berbentuk ceramah, materi promosi, pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu seperti diutarakan oleh beberapa informan berikut ini:

“Dana desa selalu kami tawarkan untuk kegiatan pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat desa. Kami selalu menggelar kegiatan pelatihan untuk pencegahan stunting yang bersumber dari dana desa. Artinya kontribusi dana desa cukup bagus untuk program pencegahan stunting” (Informan C).

“Sebenarnya alokasi untuk program pencegahan stunting itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintahan desa, tetapi kendala yang seringkali dihadapi adalah minimnya kompetensi dan pengetahuan para aparatur desa. Masih banyak program yang tidak berjalan karena staf

desa tidak paham dengan program pencegahan stunting. Tapi pada intinya kami siap memberikan pendanaan dari dana desa untuk menyukseskan program pencegahan stunting” (Informan B).

Lebih lanjut strategi pencegahan stunting berbasis dana desa dapat meningkatkan akses air bersih dan sanitasi. Pencegahan stunting tidak hanya melibatkan aspek gizi, tetapi juga kebersihan dan sanitasi lingkungan. Dana desa dapat dialokasikan untuk proyek air bersih dan sanitasi, seperti pembangunan sumur, toilet, dan sistem pengelolaan limbah (Numberi *et al.*, 2021). Dengan demikian risiko penyakit infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan anak dapat dicegah sedini mungkin. Dana desa juga dapat digunakan untuk pengembangan pertanian dan pangan lokal dan pertanian lokal, termasuk pemberdayaan petani dan pengenalan teknik pertanian yang berkelanjutan. Produksi pangan lokal yang beragam dan berkualitas dapat memberikan sumber gizi yang cukup bagi masyarakat setempat yang pada gilirannya dapat membantu mencegah stunting. Selanjutnya, dana desa bisa digunakan untuk pemberdayaan kapasitas perempuan desa. Program pencegahan stunting yang didukung oleh dana desa dapat memfokuskan pada pemberdayaan perempuan terutama ibu balita. Tujuan dari pelatihan keterampilan ini adalah untuk membantu para ibu-ibu dalam mengelola pola makan keluarga secara efektif dengan gizi seimbang.

Kendati demikian dalam pemanfaatan dana desa untuk pencegahan stunting masih terkendala dengan mitos masyarakat lokal. Mitos lain yang seringkali tercipta dikalangan masyarakat desa adalah dari pemanfaatan pangan lokal. Sejatinya banyak pangan lokal yang dapat menambah nutrisi gizi balita seperti dari tanaman daun kelor. Beberapa wilayah perdesaan, daun kelor masih dinilai sebagai tanaman mistik dan tidak bermanfaat bagi nutrisi balita. Padahal pemanfaatan daun kelor sudah banyak terbukti untuk meningkatkan nutrisi keluarga dan balita (Rikandi *et al.*, 2022).

Dengan demikian ketidakmampuan untuk mengubah pola hidup dan pangan lokal dapat menjadi kendala utama dari pencegahan stunting. Warga masyarakat yang masih memegang erat kebiasaan lama terkait pola makan dan persalinan dapat menjadi kendala utama dalam implementasi program pencegahan stunting yang berorientasi pada perubahan perilaku. Dengan demikian mitos kewargaan turut menjadi penghambat program pencegahan stunting. Hal itu seperti diutarakan oleh salah satu informan berikut ini:

“Kami diberitahu dari orang tua, nenek dan sedulur kami bahwa kalau mau melahirkan itu ya lewat dukun bayi saja, karena lebih kekeluargaan, berkah dan mudah untuk dipanggil sewaktu-waktu. Kalau melalui tenaga kesehatan biasanya lebih ribet dan berbiaya mahal, sehingga ini memberatkan bagi kami” (informan B).

“Banyak kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengulirkan program stunting seperti masih kuatnya mitos masyarakat yang mempercayai dukun bayi dalam persalinan. Terkadang sosialisasi pencegahan stunting belum bisa bermanfaat ketika masyarakat desa masih mempercayai dukun bayi daripada bidan desa” (Informan A).

“Kami belum mengetahui kalau daun kelor itu bergizi bagi penambahan nutrisi balita. Selama ini kami hanya mengetahui bahwa daun kelor itu mistik dan hanya untuk melepaskan susuk. Selain itu untuk pangan lokal kami memang tidak banyak yang memberitahukan makanan apa saja yang bergizi tinggi” (Informan C).

Dengan demikian pemanfaatan dana desa untuk pencegahan stunting

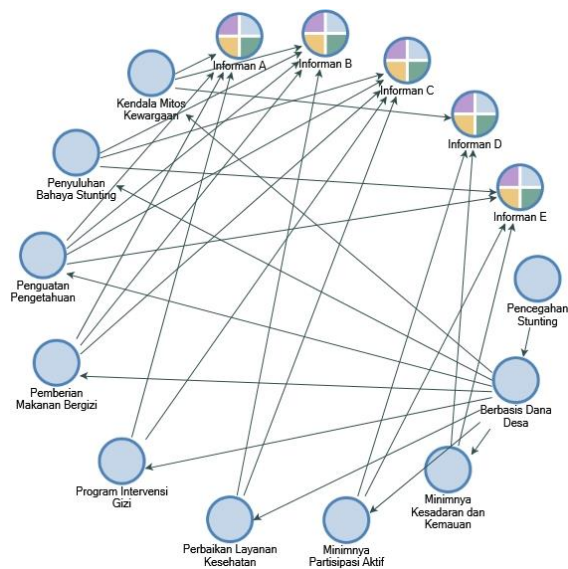
dapat berkontribusi positif untuk memperkuat peran pemerintahan desa lebih terlibat dalam program percepatan penurunan angka stunting. Berikut hasil wawancara para informan dalam penelitian pencegahan stunting berbasis *Word Cloud* Nvivo 12 Plus.



Gambar 2: *Word Cloud* Pengolahan Data Berbasis Nvivo 12 Plus

Pada akhirnya pencegahan stunting berbasis pemanfaatan dana desa juga harus didukung oleh partisipasi aktif kewargaan desa. Tanpa partisipasi aktif, maka pemanfaatan dana desa tidak tepat sasaran. Dalam program percepatan penurunan angka stunting partisipasi dan keterlibatan warga desa sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Kewargaan desa dapat membantu agar program yang digulirkan dapat tepat sasaran. Salah satu program tersebut adalah mendorong penciptaan kesadaran melalui peran suami atau ayah balita. Hal itu disebabkan peran ayah balita dapat menjadi kunci utama keberhasilan pencegahan stunting dari keluarga. Pengetahuan dan arahan tentang pentingnya ayah balita harus terus dikampanyekan oleh pemerintahan desa. Oleh sebab itu partisipasi aktif dari kewargaan desa untuk mengawal dana desa agar tepat sasaran untuk pencegahan stunting sangat diperlukan. Partisipasi aktif dari kewargaan desa dalam mengawal dana desa agar tepat sasaran dalam pencegahan stunting dapat merupakan satu kontraktual antara agensi dan principal yang sama-sama memiliki kuasa atau wewenang (Jensen & Smith, 2000). Bila kemudian pemerintah desa dapat menciptakan partisipasi aktif dalam pengawasan penggunaan dana desa, maka pemerintahan desa tersebut dapat telah mampu mengelola dengan baik dana desa (Mulyono, 2021). Dengan peran pemerintah desa dan partisipasi aktif kewargaan desa

dipercaya program percepatan penurunan angka stunting dapat segera terwujud di wilayah perdesaan terutama di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Berikut visualisasi hasil wawancara dari para informasi berbasis aplikasi Nvivo 12 Plus.



Gambar 3. Hasil Pengolahan Data Berbasis Nvivo 12 Plus

KESIMPULAN

Program pencegahan stunting di wilayah perdesaan memang diakui lebih kompleks karena banyak menemui berbagai kendala yang signifikan seperti aspek budaya dan minimnya layanan kesehatan. Hal itu membuat dibutuhkan kolaborasi antar para pemangku kepentingan agar dapat mempercepat program pencegahan stunting berbasis masyarakat desa. Para pemangku kepentingan tersebut meliputi tokoh masyarakat desa, organisasi masyarakat, komunitas, generasi muda desa, perempuan desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga pemerintahan desa. Dalam konteks perdesaan, peran aktif pemerintahan desa sangat berkontribusi dalam kesuksesan program pencegahan stunting. Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh pemerintahan desa adalah mendorong pemanfaatan dana desa untuk memperkuat program pencegahan stunting di desa. Terlebih program pencegahan stunting di perdesaan harus multi sektor dan tidak

hanya fokus pada upaya mengunggah kesadaran warga desa. Akan tetapi juga dibutuhkan pendanaan yang bisa memperkuat berbagai aspek dalam mensukseskan program pencegahan stunting. Diketahui beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam pencegahan stunting yaitu meliputi; (1) minimnya infrastruktur layanan kesehatan, (2) kuatnya mitos dan tradisi masyarakat desa, (3) minimnya pengetahuan dan wawasan para ibu balita, (4) minimnya partisipasi dari kewargaan desa. Dengan demikian pemerintahan desa dapat memanfaatkan dana desa untuk bisa mengubah berbagai kendala yang masih dihadapi dalam program pencegahan stunting. Pendanaan ini dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur layanan kesehatan seperti Posyandu, melakukan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, meningkatkan gizi balita hingga meningkatkan akses air bersih dan sanitasi.

Pemanfaatan dana desa juga dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa bisa melalui berbagai bentuk pelatihan yang bertujuan untuk penguatan kapasitas pengetahuan hingga kompetensi para ibu balita akan pentingnya pangan lokal untuk pencegahan stunting. Kendati demikian dalam mempercepat program pencegahan stunting di perdesaan, sejatinya pemerintahan desa tidak hanya menjadi sumber pendanaan tetapi juga menjadi instrumen terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa juga harus bisa mengelola dengan baik dan partisipatif dana desa untuk kepentingan pencegahan stunting. Terlebih regulasi dari Kementerian Desa telah menegaskan bahwa dana desa dapat dipergunakan untuk program pencegahan stunting. Melalui optimalisasi dana desa, maka pemerintahan desa bisa memperkuat beberapa aspek terpenting seperti penguatan infrastruktur layanan kesehatan, penguatan kesadaran dan pengetahuan para ibu balita dalam mensukseskan program pencegahan stunting di perdesaan.

Mengingat pencegahan stunting di perdesaan memerlukan perhatian yang khusus perihal pendanaan, maka dana desa bisa menciptakan potensi dan dampak signifikan dalam mengurangi angka stunting. Program pencegahan stunting berbasis dana desa juga harus didukung oleh partisipasi aktif kewargaan desa. Melalui partisipasi aktif dan keterlibatan warga desa tentu sangat menentukan keberhasilan program pencegahan stunting. Dengan demikian penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan dana desa dapat berkontribusi bagi upaya memperkuat indikator utama pencegahan stunting seperti infrastruktur layanan kesehatan, intervensi gizi, kesadaran dan pengetahuan kewargaan desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa dibutuhkan partisipasi aktif dari kewargaan desa untuk berperan aktif mengawal pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dalam pencegahan stunting di wilayah perdesaan. Penelitian selanjutnya dapat mengelaborasi dengan topik sejenis, tetapi menggunakan pendekatan metoda yang lebih berbeda seperti kuantitatif maupun metodologi penelitian campuran (mixed methode). Penggunaan metodologi yang berbeda dapat memperkaya kontribusi keilmuan tentang tata kelola dana desa bagi pencegahan stunting di wilayah perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aferiaman, T., & Noferius, Z. (2022). Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (Jamane)*, 1(1), 108-123.
- Anggreani, R. D., Margawati, A., & Nurjazuli, N. (2021). Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Sistematis Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(2), 139-151. <https://doi.org/10.48144/jiks.v14i2.571>
- Arianto, B. (2022). Melacak Pelayanan Publik Berbasis Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 13(1), 113-136.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., ... & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382-394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Asih, D. B., Supriyadi, E. I., & Sofyan, M. M. (2022). Kebijakan Dana Desa Dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting Di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih. *Jurnal Identitas*, 2(1), 22-32. <https://doi.org/10.52496/identitas.v2i1.217>
- Bismo, P. A., & Sahputra, R. E. (2021). Peningkatan Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Penyederhanaan Penyaluran Dana Desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(2), 77-88. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.77-88>
- Bps.go.id.(2021). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. (2003). *Research Design* (pp. 155-179). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fariz, R. F., Subarkah, S., & Sulistyowati, S. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa pada Penetapan APBDesa Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 2 tahun 2019 dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1), 87-96.

- Gayo, S. B., Erlina, E., & Rujiman, R. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. *Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 202-209. <https://doi.org/10.23887/mkg.v21i2.29805>
- Handayani, B. (2021). The Role of Nasyiatul Aisyiyah and Fatayat NU Cadres in Preventing Stunting Cases in Indonesia. *Muhammadiyah International Public Health and Medicine Proceeding*, 1(1), 329-338. <https://doi.org/10.53947/miphmp.v1i1.70>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100-108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Imawan, A., & Mas'adah, N. (2021). Transformasi Tata Kelola Dana Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 689-710. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.39>
- Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 5(2), 107-121. <https://doi.org/10.32503/jmk.v5i2.1007>
- Jensen, M.C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm Manajerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Jensen, M. C., & Smith, C. W. (2000). Stockholder, manager, and creditor interests: Applications of agency theory. *Theory of the Firm*, 1(1).
- Kemenkeu.go.id. (2022). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lu buksikaping/id/data-publikasi/artikel/3038-pemanfaatan-dana-desa-untuk-penanganan-stunting.html>
- Kemkes.go.id. (2017). https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Buku_Saku_Stunting_Desa.pdf
- Lela, N., Haeruddin, H., & Amelia, A. R. (2023). Hubungan Penggunaan Dana Desa dengan Penurunan Kasus Stunting di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health*, 4(4), 170-183. <https://doi.org/10.52103/jmch.v4i4.1421>
- Lestari, P., Pralistami, F., Ratna, D., Hamijah, S., & Harahap, R. A. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2227-2230. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2789>
- Mujiwardhani, A., Wibowo, H., & Mulya, I. T. (2019). Dampak alokasi dana desa bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164-164. <https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss2.art52>
- Mulyono, M., Rahman, A., & Attamimi, U. (2021). Kemampuan Pemerintah Desa dalam Mengelola Dana Desa. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 1(2), 100-118.

- Mustafa, I., & Kusyati, A. N. H. (2021). Implementasi Komunikasi Kesehatan dalam Kampanye Cegah Stunting Studi Deskriptif Terhadap Pola Komunikasi Penyuluh Kesehatan Kepada Masyarakat Dalam Upaya Cegah Stunting di Desa Tilang, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Communicatio*, 35-45.
- Nugraheni, S. (2022). <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/02/menggunting-stunting-di-perdesaan>
- Numberi, M. L., Sumule, A. I., & Tjolli, I. (2021). Aspek-Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Dan Pemanfaatan Dana Desa (Studi Kasus Kampung Wamesa Dan Warkomi Di Distrik Manokwari Selatan). *Jurnal Kehutanan Papuasia*, 7(1), 26-40.
- Perbawasari, S., Sjoraida, D. F., Anisa, R., & Masrina, D. (2022). Sosialisasi Pemanfaatan Mitos dalam Komunikasi Kesehatan kepada Masyarakat Desa Selasari Pangandaran. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 21-32. : <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1065>
- Permatasari, T. A. E. (2020). Pengaruh pola asuh pembrian makan terhadap kejadian stunting pada balita. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 14(2), 3-11. <https://doi.org/10.24893/jkma.v14i2.527>
- Pua, A., Maramis, F. R., & Tucunan, A. A. (2021). Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 10(8).
- Rikandi, M., Lamona, A., & Sari, W. K. (2022). Pemanfaatan Daun Kelor Sebagai Upaya Pencegahan Kejadian Stunting Pada Anak Usia Pra Sekolah Di Tk 'Aisyiyah 6 Padang. *GEMASSIKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 47.
- Widayati, N., & Aco, F. (2020). Pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.30588/jep.v3i2.686>
- Widaryanti, R. (2022). Penurunan Masalah Gizi Pada Anak Usia Dini Melalui Edukasi PMT-AS. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(5), 1168-1173. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i5.10762>
- Widyowati, R., & Utomo, I. H. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(2), 278-296. <https://doi.org/10.20961/wp.v3i2.76235>